PARIWISATA TETAP JADI YANG UTAMA

Target PAD 2021 Capai Rp 24 Miliar

BANTUL (KR) - Meski pandemi Covid 19 belum ada indikasi bakal tuntas dalam waktu dekat. Namun Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berani pasang target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor wisata tahun 2021 mencapai Rp 24 miliar. Angka tersebut naik sekitar Rp 10 miliar di banding tahun 2020.

Sejauh ini objek wisata Pantai ParangtritisñDepok masih jadi tulang punggung Dinas Pariwisata Bantul untuk berkontribusi paling tinggi ke PAD. Sementara DPRD Bantul berpendapat, sektor wisata harus bergerak karena banyak kegiatan ekonomi didalamnya.

"Tahun 2020 kemarin target awal Rp 32 miliar kemudian ada revisi karena Covid-19 terus meningkat. Kemudian Pemkab Bantul merevisi dari target Rp 32 miliar turun jadi Rp 14 miliar. Di luar dugaan realisasi akhir tahun 2020 ternyata mencapai 16 miliar," ujar Kasi Promosi dan Pelayanan Informasi Wisata Dinas Pariwisata Bantul, Markus Purnomo Adi SE, Rabu (13/1).

Dijelaskan, selama ini Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul tetap tergantung pada Pantai Parangtritis untuk mencapai target yang ditetapkan. Karena pemasukan dari pantai di selatan Bantul tersebut mencapai 90% dari keseluruhan objek dibawah Dinas Pariwisata, sebanyak 7 kawasan.

Meski begitu, ketika vaksin Covid-19 sudah tersalur ke masyarakat, tentunya semuanya berangsur normal. Dengan demikian sektor wisata kembali bergairah seperti tahun sebelumnya. "Nanti kalau vaksin Covid-19 terdistribusikan ke masyarakat dan kondisi sudah normal, harapannya sektor wisata juga kembali pulih," ujarnya.

Ketua Komisi B DPRD Bantul, Aryunadi SE, mengatakan jika target PAD sektor wisata memang hasil keputusan politik anggaran DPRD Bantul dan Dinas Pariwisata Bantul. "Situasinya seperti ini. Hal itu keputusan kita bersama. Tapi nanti perkembangan ke depan bagaimana ya kita lihat dan realistis saja. Nanti kalau bisa mencapai target ya alhamdulillah, kalau tidak ya nanti kita diskusikan secara khusus di tingkat pembahasan ketika perubahan anggaran," ujar politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sektor wisata harus semangat, karena didalamnya ada kehidupan UMKM, dan ekonomi, tetapi kesehatan tetap segalanya. Aryunadi tidak menampik kondisi kekinian belum ada tanda-tanda segera membaik. Tepi untuk target tersebut dalam satu tahun anggaran untuk 12 bulan.

"Mudah-mudahan triwulan pertama nanti pandemi berkurang secara drastis dengan catatan semua warga masyarakat dan pemerintah taat prokes. Dalam hidup manusia, kesehatan memang nomor satu. Tapi tidak bisa dipungkiri, sisi ekonomi juga sangat penting," tuturnya. **(Roy)-f**

KR-Sukro Riyadi

Keindahan Pantai Parangtritis Kretek Bantul tetap menjadi pilihan wisatawan.

Bantul Tak Terima Tamu Luar DIY

BANTUL (KR) - Selama masa Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM), Pemkab Bantul menyatakan tidak akan menerima kunjungan tamu dari luar DIY. Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk antisipasi dan pencegahan penularan Covid-19.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul, Drs H Helmy Jamharis MM kepada wartawan, Rabu (13/1), menuturkan kebijakan ini sesuai dengan instruksi No 2/Instr/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Perkantoran Pemerintah dan Swasta di Kabupaten Bantul tertanggal 12 Januari 2021. "Instruksi ini merupakan tindak lanjut instruksi Gubernur DIY No 2/Instr/2021 tentang PSTKM di DIY guna memutus mata rantai penularan Covid-19," jelasnya.

Diungkapkan, mengacu pada instruksi tersebut, selain tidak diperkenankan menerima tamu dari luar DIY, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga tidak diperbolehkan sementara melakukan perjalanan dinas. "Kami menerapkan pembagian aturan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO). Namun aturan ini juga menyesuaikan instansi yang bersangkutan," ujarnya.

Sistem WFH pada instansi vertikal dan BUMN/-BUMD, pengaturannya berdasarkan kebijakan pimpinan instansi masing-masing. Jika jumlah karyawan terbatas atau jenis pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan dari rumah, pimpinan instansi dapat mengatur persentase WFH sesuai kebutuhan dengan tetap memperhatikan terlaksananya protokol kesehatan secara optimal.

Sementara pelaksanaan instruksi ini di lapangan diserahkan kepada kepala OPD masing-masing. Sedangkan untuk kegiatan rapat, dapat dioptimalkan secara virtual. Untuk tatap muka dalam ruang, dapat dilakukan dengan jumlah peserta paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan.

"Sementara kami melarang ASN untuk melakukan perjalanan dinas keluar DIY dan kami tidak menerima tamu kunjungan dari luar DIY demi menjaga kesehatan bersama," tutur Helmy.

Dalam instruksi juga disebutkan imbauan untuk menerapkan sistem kerja WFH tidak diberlakukan untuk perangkat daerah dengan unit kerja Dinas Kesehatan, Satpol PP, RSUD dan RS swasta, Puskesmas, klinik dan sarana pelayanan kesehatan lainnya, Satgas Covid-19 kabupaten, kapanewon dan kalurahan serta unit kerja pada perangkat daerah yang menangani langsung kaitan kesehatan, kebersihan, persampahan dan beberapa unit kerja lain. **(Aje)-f**

Komisi D Usulkan Shelter Covid-19 di Tiap Desa

BANTUL (KR) - Komisi D DPRD Bantul mengusulkan dibentuk Shelter Covid-19 di tiap desa. Pasalnya angka kasus penyebaran Covid-19 di Bantul sudah semakin mengkhawatirkan.

"Kami mengusulkan supaya tiap desa memiliki shelter isolasi Covid-19. Ini dilakukan untuk mengantisipasi tidak tertampungnya pasien positif Covid-19 di rumah sakit," jelas anggota Komisi D DPRD Bantul, Paidi SPd, Kamis (14/1).

Menurut Paidi, pihaknya lebih merekomendasikan warga isolasi di fasilitas pelayanan (faskes) tersedia atau di shelter isolasi Covid-19. Hal ini karena melakukan isolasi di tempat yang sudah direkomendasikan dilengkapi dengan fasilitas pengawasan dan pemantauan kesehatan oleh tenaga medis.

"Bagaimana menu makanannya, bagaimana pemberian obat dan multivitamin, bagaimana protokol kesehatan selama masa karantina. Dalam shelter akan diatur dan terukur berbeda ketika melakukan isolasi mandiri di rumah," paparnya.

Warga yang terpapar Covid-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah risikonya tidak terpantau tenaga medis. Bahkan ada yang menjalani isolasi mandiri, namun mereka masih keluar dan berinteraksi dengan tetangga. Hal ini justru berpotensi menularkan virus di kawasan tersebut.

"Artinya butuh kesadaran tinggi bagi warga yang isolasi mandiri untuk terus menjaga kesehatan diri sendiri dan orang lain," tegasnya.

Oleh karena itu, shelter darurat Covid-19 hendaknya wajib dibangun di tiap desa. Gedung yang dipakai untuk shelter dapat gedung mangkrak yang sudah tak berfungsi kemudian dibangun kembali dengan fasilitas layak untuk menjadi shelter isolasi Covid-19. Adapun biaya operasional shelter ini dapat secara gotong royong mandiri desa dan masyarakat.

Ditanya tanggapan mengenai vaksin, Paidi menambahkan vaksin memang sangat penting dan diperlukan sekali untuk membuat target warga Bantul memiliki *herd imunity* sebesar 70 persen tercapai. **(Aje)-f**

KR-Rahajeng Pramesi

Salah satu gedung yang dijadikan shelter isolasi Covid-19 di Desa Sumbermulyo Bambanglipuro.

PEMERINTAH TIDAK KENDOR PERANGI COVID-19

Warga Bersyukur Diingatkan Satpol PP

PIYUNGAN (KR) - Pemkab Bantul tidak mengendorkan tekadnya memerangi penyebaran Covid-19. Bahkan Tim Operasi Patuh Covid-19 dari unsur Satpol PP, Kodim serta Polres Bantul terus memberikan edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan. Sejumlah masyarakat bersyukur dan berterimakasih Satpol PP dan petugas lainnya terus mengingatkan mereka untuk selalu melaksanakan prokes.

"Sebagai warga masyarakat, saya sama sekali tidak merasa keberatan dengan petugas dari Satpol PP yang datang untuk memberikan sosialisasi tentang pencegahan Covid-19," ujar Suwardi pemilik warung Almas di Karanggayam Kalurahan Sitimulyo Piyungan Bantul, Kamis (14/1).

Suwardi mengungkapkan, memerangi Covid-19 tidak sebatas tugas dari pemerintah atau Satpol PP, TNI/Polri. Semua elemen masyarakat harus terlibat dalam mencegah Covid -19 berkembang. Pihaknya memberikan apresiasi kepada Satpol PP dan petugas gabungan yang datang memberikan penjelasan ke tokonya. "Alhamdulillah ini dari petugas Satpol PP memberikan penjelasan tentang aturan bupati dan juga mengingatkan agar warga datang ke toko ini dicek suhu badan, bermasker serta selalu cuci tangan," ujar Suwardi.

Sementara petugas juga mendatangi toko jejaring di Piyungan. Kasi Pembinaan Masyarakat Satpol PP Bantul, Eko Wahyudi SSos MM didampingi Komandan Regu Patroli dan PAM Satpol PP Bantul Suparjono, menjelaskan kepada penanggungjawab toko Wahyu Kurniawan tentang Instruksi Bupati No 1 Tahun 2021. Termasuk pentingnya melaksanakan prokes. Petugas juga minta agar pengunjung dicek suhu sebelum masuk toko.

Wahyu Kurniawan mengaku sudah mendapatkan surat instruksi bupati dan sudah melaksanakan baik prokes dan ketentuan jam buka. Pihak pengelola toko patuh terhadap instruksi bupati.

Sementara Kasat Pol PP Bantul, Yulius Suharta, mengatakan sosialisasi dan pengawasan prokes bakal dilakukan terus. Sesuai instruksi bupati tentang Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM) terus digencarkan 11-25 Januari 2021.

Selama pengawasan petugas kerap menemukan warga mengaku belum mendapat informasi tentang Instruksi Bupati. Oleh karena itu teguran dan sosialisasi terus diberikan kepada masyarakat. **(Roy)-f**

KR-Sukro Riyadi

Petugas Satpol PP Bantul memberikan sosialisasi instruksi bupati di Piyungan Bantul.

ANGKA POSITIF COVID-19 TAK KUNJUNG TURUN

Usai PTKM, Dikpora Efektifkan Home Visit

BANTUL (KR) - Lantaran angka kasus positif Covid-19 yang tidak kunjung turun, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bantul akan mengefektifkan program *home visit* usai Pengetatan secara Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

Adapun home visit kepada siswa nanti dilakukan dengan protokol kesehatan ketat dan bermacam syarat yang harus terpenuhi untuk melakukan *home visit*. Kepala Dikpora Bantul, Drs Isdarmoko MPd MPar, Kamis (14/1), menuturkan Dikpora Kabupaten Bantul mempunyai terobosan untuk meningkatkan pembelajaran.

"Terobosan tersebut yakni guru kunjung siswa, dimana dilakukan tidak hanya kunjungan ke rumah siswa seperti biasa. Tapi di rumah siswa tersebut guru mengunjungi siswa dalam rangka penguatan pembelajaran. Siswa dan orangtua dapat curhat bagaimana keluhan KBM Online, metode apa yang akan diterapkan demi kenyamanan bersama, bagaimana cara guru, siswa dan wali siswa mengurai dan memecahkan kendala tersebut," urainya.

Selanjutnya adapula program Layanan Konsultasi Pelajaran. "Untuk melaksanakan GKS (Guru Kunjung Siswa) maupun LKP (Layanan Konsultasi Pelajaran), juga mempunyai prosedur yaitu melihat kondisi daerah. Jika kawasan siswa berada dalam zona yang angka Covid-19 dan transmisi lokal masih tinggi maka dapat didiskusikan dan ditinjau lebih lanjut," paparnya.

Dalam LKP serta GKP nantinya pihak sekolah wajib berkoordinasi dengan tim penanggulangan Covid-19 yang ada di kapanewon. Di samping itu juga harus melalui mekanisme koordinasi izin dari komite dan juga orangtua. "Apabila tidak ada persetujuan dari wali dan komite, kunjungan guru akan ditangguhkan kembali," paparnya.

Sementara terkait rencana untuk memulai pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Bantul ditunda hingga batas waktu tak ditentukan. "Penundaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan tatap muka, demi memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga sekolah serta mencegah terjadinya klaster sekolah," jelsnya. **(Aje)-f**